

OPEN  
RESPONSE + OPEN  
RECOVERY

# Strengthening Transparency and Accountability in Budgeting and Contracting



**Gambar 1:** Bantuan bagi masyarakat yang terdampak wabah virus Corona.  
Sumber: Antara / Aji Setyawan

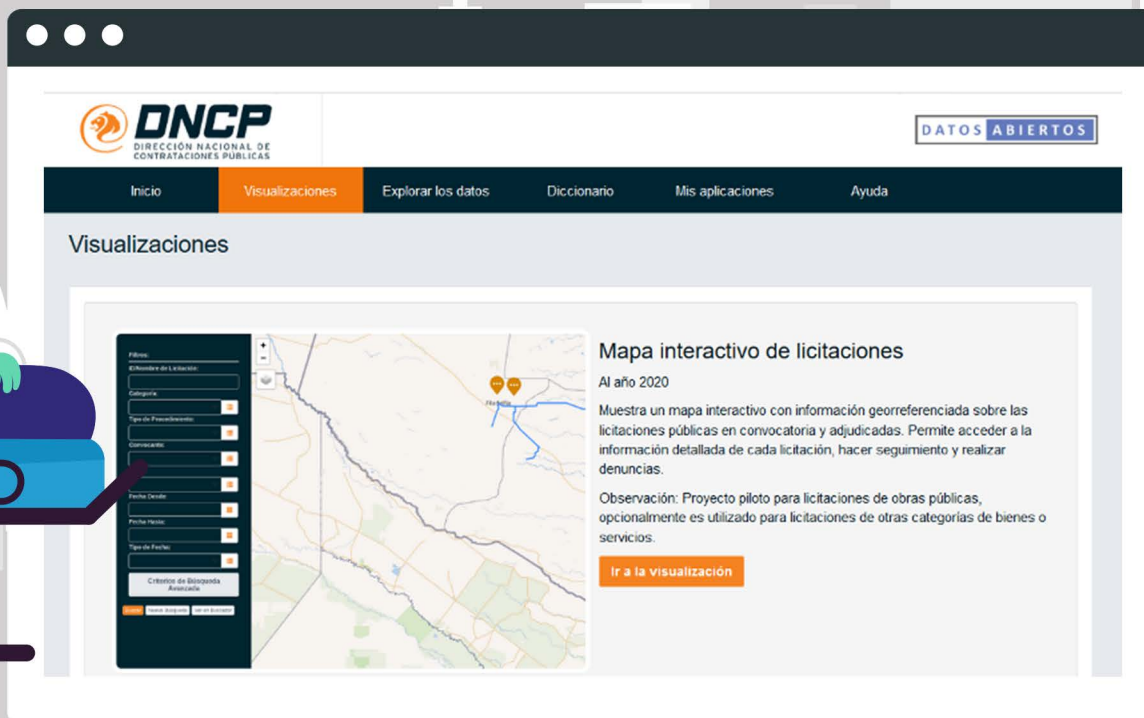
Untuk menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh dunia menyuntikkan sejumlah dana yang cukup besar untuk merangsang perekonomian dan menanggulangi keadaan darurat. Peran akuntabilitas dan transparansi menjadi lebih penting dibandingkan keadaan normal. Open Government Partnership (OGP) mengadakan webinar dengan fokus pada bagaimana memperkuat proses transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengadaan publik ketika masa darurat dengan memungkinkan respon yang cepat, efisien dan transparan. Webinar ini mengeksplorasi peran penting organisasi masyarakat sipil dan lembaga audit dalam menjaga dana dan memastikan bahwa dukungan mendesak tiba di tempat yang paling dibutuhkan serta prioritas terhadap masyarakat rentan.

Webinar ini dilatarbelakangi oleh keadaan dua bulan terakhir yang sangat intens bagi semua pemerintah di dunia. Sebagian besar sistem kontrak publik di seluruh dunia tidak dirancang untuk menjadi cepat dan akuntabel pada saat yang sama. Akibatnya, sebagian besar lembaga pemerintah berusaha keras untuk mengamankan peralatan medis yang dibutuhkan dengan koordinasi yang buruk dan sedikit transparansi. Situasi ini telah menghasilkan skenario 'hunger games' di mana rumah sakit, lembaga, dan

pemerintah saling menawar dan menaikkan harga, menyebabkan kekurangan, dan telah memungkinkan beberapa insiden serius penipuan dan korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, OGP mengundang beberapa pakar dalam bidang transparansi dan akuntabilitas seperti Jeannette von Wolfersdorff (Executive Director, Observatorio Fiscal Chile), Sayed Ikram Afzali (Executive Director, Integrity Watch Afghanistan), Pablo Seitz (Director of Public Procurement, Paraguay) dan Lorena Rivero del Paso (Global Initiative for Fiscal Transparency).

**Pablo Seitz** mengungkapkan bahwa resiko dalam pengadaan barang dan jasa publik yaitu korupsi dan mismanagement dapat dicegah melalui transparansi. Transparansi akan meningkatkan ketersediaan informasi yang akurat mengenai pengadaan barang dan jasa. Dalam masa krisis ini, transparansi menjadi penting bagi semua pihak untuk mengetahui dasar dari sebuah kebijakan dan menilai apakah kebijakan tersebut mempunyai legitimasi yang kuat atau tidak. Ketika masa krisis, transparansi menjadi lebih penting dalam hal meningkatkan kepercayaan dalam rantai pasok global. Sebuah pemerintahan harus meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang akurat dan terbuka terhadap mitra kerjanya.





Gambar 2: Website Open Data Pengadaan Publik di Paraguay  
Sumber: <https://www.contrataciones.gov.py/>

Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diharapkan berperan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik tetapi juga sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi. Dalam masa pandemi, pengadaan barang dan jasa harus melihat sebuah kesempatan untuk dapat menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Pemerintah harus tetap menjaga konsumsi untuk menggerakkan roda perekonomian melalui pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Paraguay melalui Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) atau Badan Nasional Pengadaan Publik telah membuka data pengadaan publik dalam website. Hal ini untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dengan informasi yang terbuka, publik akan berpartisipasi dalam mengawasi proses pengadaan di Paraguay.

**Jeannette von Wolfersdorff** menyampaikan bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting. Lembaga pengawas milik publik dan lembaga audit lainnya harus dapat mengakses data-data terkait pengadaan barang dan jasa dalam masa darurat. Hal ini untuk memberikan *red flag system* bagi pengadaan yang berpotensi atau sudah disalahgunakan. Data yang diberikan oleh Pemerintah Chile belum termasuk cukup karena publik hanya mendapatkan data agregat dan bukan data yang lengkap. Beberapa rekomendasi untuk pemerintah diantaranya adalah perlunya transparansi realokasi anggaran dan data pengadaan barang dan jasa untuk melihat efektivitas dari stimulus fiskal yang telah dilakukan.

**Sayed Ikram Afzali** menyebutkan bahwa Integrity Watch Afghanistan telah berperan mendorong efektivitas pengadaan barang dan jasa kesehatan melalui pengumpulan data dari 50 pusat fasilitas kesehatan di Afganistan. Data ini dikumpulkan oleh komite publik yang dibentuk di setiap fasilitas kesehatan. Data ini selanjutnya akan diolah dan disajikan kepada Pemerintah Afganistan sebagai tindak lanjut untuk membenahi pengadaan barang dan jasa kesehatan. Tindakan lainnya mengawasi pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Komite publik ini tidak hanya menilai pelayanan publik di fasilitas kesehatan tetapi juga memungkinkan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan publik.

Pembicara terakhir **Lorena Rivero del Paso** menjelaskan bahwa pandemi COVID-19, membuat penyelenggaraan keuangan publik menjadi lebih rumit karena ketidakpastian di pasar dan masa pandemi. Misalnya, beberapa negara sudah mengalami defisit dalam anggarannya dikarenakan besarnya anggaran untuk penanganan COVID-19 dan potensi pendapatan yang menurun. Sistem keuangan publik di semua negara belum fleksibel dan transparan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Infrastruktur untuk penyediaan dan publikasi data yang lebih baik dan akurat sebagai alat untuk pengambilan keputusan di masa pandemi. Global Initiative for Fiscal Transparency sudah menyediakan petunjuk bagi pemerintah untuk mengelola kebijakan fiskal lebih baik dan transparan melalui <http://www.fiscaltransparency.net/covid19/>.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kampanye Open Response + Open Recovery, silahkan mengunjungi laman [www.opengovpartnership.org](http://www.opengovpartnership.org)